

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan profesi dibidang Ilmu Komunikasi menunjukkan kecenderungan sebagai sebuah profesi yang diminati, baik oleh masyarakat, pengamat dan terlebih pihak lembaga/ institusi bahkan perusahaan. Ilmu komunikasi di suatu lembaga, perusahaan atau instansian mendapat sorotan dari para *stakeholder* yang kini semakin menyadari akan pentingnya kehadiran ilmu komunikasi sebagai peningkat citra dan pada titik tertentu yang dapat menjadi keuntungan bagi lembaga atau perusahaan tersebut.

Pada saat ini perkembangan dunia komunikasi memberi dampak bagi perkembangan media siar untuk mengoptimalkan kinerja, dalam rangka menyebarkan berbagai informasi terkait suatu peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan, lingkungan maupun yang memiliki kaitannya terhadap kehidupan masyarakat. Penyebaran informasi tidak lagi membutuhkan jangka waktu yang lama, begitu pula dengan perkembangan suatu peristiwa yang terjadi, yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya seperti isu, opini publik, dan berbagai persoalan yang menyangkut

masyarakat terlebih dibidang politik, dengan adanya perkembangan teknologi serta beragam informasi terhadap masyarakat, media massa dapat berkembang secara luas dan cepat, akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya akan merugikan.

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintah yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya, dengan kebebasan pers masyarakat akan mengetahui berbagai kinerja pemerintah, kasus pemberitaan yang menyangkut pemerintah, sehingga muncul istilah *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Oleh karenanya media massa sering kali disebut dengan istilah *the fourth estate of democracy*, pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berita harus memenuhi beberapa unsur yang nantinya akan membuat suatu berita tersebut layak untuk dipublish. Berita harus cepat dan cermat, dalam bahasa jurnalistik harus akurat selain akurat berita harus berimbang tidak memihak. Berita harus objektif, karena berita memiliki power untuk menciptakan opini publik, jadi sesuatu yang ditulis oleh media harus memenuhi unsur-unsur diatas agar tidak ada pihak yang tidak dirugikan (Kusumaningrat 2006:47)

Politik dan media memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Media masa khususnya harian dan elektronik memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis, hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berfikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonis. Pada sisi

lain, kepentingan media akan informasi juga telah membuat celah tersendiri bagi orang-orang tertentu untuk memanfaatkan media yang begitu haus akan publisitas, mereka dengan cerdas mengemas berbagai peristiwa sehingga ia bisa selalu muncul diberbagai media. Bagi orang yang seperti ini, media adalah kendaraan politik. Ia mampu membangun relasi dengan orang-orang internal media serta pandai membungkus peristiwa melalui komentar-komentar atau aksi-aksi yang sesuai dengan selera wartawan.

Media massa bukan sekadar sarana yang menampilkan kepada publik peristiwa politik secara apa adanya, tetapi tergantung kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan demikian apapun yang dihasilkan dan ditampilkan oleh media merupakan representasi dari ideologi media massa tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki media massa, maka lembaga-lembaga politik seperti partai politik, organisasi pemerintah, kelompok kepentingan, serikat buruh, LSM, dan sebagainya, seringkali memanfaatkan media massa untuk tujuan-tujuan politik (Schramm, 1975:468).

Pan dan Kosicki menilai, analisis *framing* agak berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam analisis isi kualitatif, karena dalam analisis *framing*, teks berita dilihat dari berbagai simbol yang disusun melalui perangkat simbolik yang dipakai yang akan dikonstruksi dalam memori khalayak, dengan kata lain, tidak ada pesan atau stimuli yang bersifat objektif, sebaliknya teks berita dilihat sebagai seperangkat kode yang

membutuhkan intepretasi. Seperti diakui oleh Pan dan Kosicki, *framing* adalah bagian dari proses besar bagaimana publik menafsirkan isu-isu atau kebijakan politik tertentu (Eriyanto, 2002:290).

Analisis *framing* membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, mana lawan mana kawan, mana patron mana klien dan siapa diuntungkan dan dan siapa dirugikan, siapa membentuk dan siapa dibentuk dan seterusnya.

Mengingat pentingnya media massa, tidaklah berlebihan penulis menyebutkan begitu besarnya peran media massa terhadap masyarakat khususnya terhadap pola pikir yang akan menentukan suatu prilaku yang akan diambil, yang dibutuhkan suatu penggunaan media massa oleh orang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Peran pers sangat penting sebagai salah satu pilar demokrasi, selain menyampaikan liputan-liputan terkait sebagai salah satu fungsi pengawasan, juga mendorong pembangunan karakter bangsa. Selain karakter bangsa, media massa dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dalam masa transisi dari masa otoritarian ke masa demokrasi. Maka dari itu pers dan media massa agar bisa ikut meluruskan *mindset* dan paradigma yang masih keliru dari sistem otoritarian ke demokrasi.

Dari pernyataan tersebut media massa agar menjadi garda terdepan sebagai jembatan atau penghubung kepada masyarakat dalam memberikan

pemahaman-pemahaman tentang kehidupan berdemokrasi dan bernegara. Dalam penelitian ini ilmu komunikasi berperan penting khususnya melalui media masa terhadap proses pemaknaan sebuah pesan yang disampaikan melalui media massa (surat kabar).

Kebebasan pers dimulai ditandai dengan munculnya Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Ketika itu mulai bermunculan berbagai media massa baru dimasyarakat. Sayangnya, kelahiran pers ini bukan saja membawa dampak pada terburuknya saluran dan sumber informasi komunikasi di masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah lain. Berita yang ada di media massa merupakan suatu cara untuk menciptakan realitas yang diinginkan mengenai peristiwa atau (kelompok) orang yang dilaporkan. Oleh karena telah melewati proses seleksi dan reproduksi, berita surat kabar sebenarnya merupakan laporan peristiwa yang artifisial, tetapi dapat diklaim sebagai objektif oleh surat kabar itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologi dan bisnis surat kabar tersebut. Dengan kata lain berita yang ada di media massa, bukan sekedar menyampaikan tetapi juga menciptakan makna (Eriyanto 2002:12).

Tempo sebagai salah satu media massa (surat kabar) terbesar di Indonesia juga berperan penting akan pemberitaan dan isu politik yang terjadi di Indonesia, seperti kasus mega korupsi E-KTP yang menyeret Setya Novanto selaku Ketua DPR-RI non aktif saat ini, setelah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus yang terjadi antara Setya Novanto dan KPK

turut juga melibatkan beberapa petinggi partai politik menjadi memanas, konflik yang terjadi banyak melibatkan media surat kabar dalam memberitakan permasalahan ini salah satunya surat kabar TEMPO. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat pembingkain yang dilakukan surat kabar TEMPO terhadap kasus E-KTP Setya Novanto dan bagaimana surat kabar tersebut mengemas pemberitaan yang keluar berimbang ataupun memihak.

Lebih mendalam lagi saat Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus E-KTP merupakan ketua umum partai Golkar saat itu, hal ini menjadi menarik terhadap dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar dalam periode Pemilu 2019. Jika dikaitkan dengan partai dan kasus yang menjerat Setya Novanto, dapat menimbulkan asumsi atau asap praduga baik dari masyarakat, media atau KPK terhadap Setya Novanto dan partainya mengenai apakah masih ada dari golongan partai Golkar atau partai lain yang terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.

Hal ini tentu terkait salah satu pemberitaan dibulan Maret yang disajikan Tempo melalui surat kabarnya yang terbit edisi tanggal 23 Maret 2018, yang dijadikan headline dalam surat kabar Tempo. Bahwa dalam berita tersebut Setya Novanto dalam kasus ini tidak mau terlibat sendiri dalam headline Tempo “Setya Novanto Tak Mau Sendiri” hal ini menjadi bukti bahwa Setya Novanto menjadi peran penting dalam kasus ini, terlebih dalam salah persidangan dia turut menyeret keterlibatan Puan

Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari fraksi partai PDI dan Pramono Anung seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Sejak 12 Agustus 2015, Setya Novanto menyeret keduanya dalam keterlibatan kasus E-KTP.

Setya Novanto turut mengajukan kepada jaksa penuntut umum dan KPK mengenai *Justice Collaborator* untuk dirinya dalam perkara korupsi E-KTP, dalam pengajuannya menjadi *Justice Collaborator* yaitu orang yang memiliki status terdakwa yang ingin berkerjasama dengan KPK untuk mengungkap kasus korupsi secara keseluruhan yang terlibat dibawahnya. Entah dengan tujuan pribadi seperti pengurangan masa tahanan atau apapun.

Peneliti memilih media surat kabar ini berdasarkan kepemilikan media tersebut dimana media tersebut bukanlah anggota sebuah partai, karena saat ini banyak para pemilik media yang berkecimpung dalam dunia politik dan menjabat sebagai ketua atau anggota partai politik, sehingga peneliti memilih media surat kabar TEMPO sebagai media yang akan diteliti. Berdasarkan faktor inilah peneliti mengambil judul: ”

**Pemberitaan Konflik Kasus E-KTP Setya Novanto Dengan KPK di Media Surat Kabar (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Pada Media Surat Kabar Tempo Edisi Maret 2018)**

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka mengantarkan kita pada pertanyaan:

- a. Bagaimana wartawan mengkonstruksi pemberitaan konflik Setya Novanto dengan KPK dalam kasus E-KTP pada surat kabar Tempo edisi Edisi Maret 2018).
- b. Bagaimana wartawan mampu menjaga netralitas pemberitaan dalam menyampaikan berita kepada khalayak ?
- c. Bagaimana wartawan menampilkan fakta pemberitaan kasus E-KTP Setya Novanto pada surat kabar Tempo ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kontruksi pemberitaan yang dilakukan oleh media Tempo dalam menyampaikan sebuah peristiwa dalam kasus E-KTP Setya Novanto dengan KPK.
- b. Untuk mengetahui netralitas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan / media Tempo.
- c. Untuk megetahui faktualitas pemberitaan terhadap kasus E-KTP Setya Novanto yang disajikan wartawan / media.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai implementasi disiplin ilmu yang dimiliki terutama berkaitan dengan komunikasi dan sebagai sarana pengembangan keilmuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang berkaitan dengan ilmu komunikasi.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini adalah penggambaran bagaimana peminjaman berita dilakukan media dalam memberitakan sebuah peristiwa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan hasil penelitian sebagai pencerahan dan informasi kepada masyarakat mengenai penelitian ini dan dapat membawa pencerahan pada media pada umumnya dan khususnya surat kabar Tempo dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan netralitas media dalam pemberitaan.